

## MONITORING DAN EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019

- Jumlah RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2019 : 55 RUU

Berdasarkan Keputusan DPR RI No. 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019

REKAPITULASI PELAKSANAAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2019						
PRIORITAS	RINCIAN RUU	RUU Prioritas	REALISASI			
			DAFTAR KUMULATIF TERBUKA			
			DOB	RATIFIKASI	APBN	PERPPU
Tahun 2019 <b>55 RUU</b>	- 35 RUU Usulan DPR, 16 RUU Usulan Pemerintah, 4 RUU Usulan DPD	<b>3 RUU</b> (DPR 3)		5		
<b>JUMLAH</b>		<b>3 RUU</b> (DPR 3 + Pem 0)	-			

Total Jumlah UU yang diselesaikan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019 adalah **3 (Tiga)** UU.

### DAFTAR JUDUL RUU YANG TELAH DITETAPKAN

PRIORITAS TAHUN 2019			
NO.	JUDUL RUU	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR	<b>UU No. 13 Tahun 2018</b> tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2.	RUU tentang Kebidanan	DPR	<b>UU No. 4 Tahun 2019</b> tentang Kebidanan
3.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR	

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RUU PRIORITAS TAHUN 2019**

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PERNAH MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN					PROSES				KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK I	PEMBAHASAN TK II	
1	RUU tentang Pertanahan	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR			Pembahasan Tk I		Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 09 Juni 2016 MP.V 2015-2016 dibahas oleh Komisi II
2	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR		DPR	DPR	DPR	DPR			Pembahasan Tk I		Rapat Konsultasi Rapat Bamus tgl. 18 Januari MP III 2016-2017 dibahas oleh Komisi III
3	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR			Pembahasan Tk I		Komisi IV DPR RI Rapat Intern Tim Perumus Panitia Kerja RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Rapat tertutup) Tgl 28 Januari 2019
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR			Pembahasan Tk I		

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PERNAH MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN					PROSES				KETERANGAN	
			2015	2016	2017	2018	2019	INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK I	PEMBAHASAN TK II		
	Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat												
5	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR						Disahkan dalam Rapat Paripurna Pembicara tingkat II / pengambilan keputusan terhadap RUU tentang penyelenggara ibadah haji dan umroh; tgl 28 Maret 2019
6	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR			DPR	DPR	DPR				Pembahasan Tk I		
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR			DPR	DPR	DPR				Pembahasan Tk I		
8	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR				Pembahasan Tk I		
9	RUU tentang Pertembakauan	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR				Pembahasan Tk I		
10	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR				Pembahasan Tk I		
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4	DPR			DPR	DPR	DPR						Disahkan menjadi <b>UU No. 13 Tahun</b>

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PERNAH MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN					PROSES				KETERANGAN	
			2015	2016	2017	2018	2019	INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK I	PEMBAHASAN TK II		
	Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam												<b>2018</b> tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
12	RUU tentang Kebidanan	DPR		DPR	DPR	DPR	DPR						Disetujui menjadi UU pada rapat Paripurna tgl 13 Feb 2019
13	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR			DPR	DPR	DPR			Pembahasan Tk I			
14	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	DPR			DPR	DPR	DPR			Pembahasan Tk I			
15	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD			DPR	DPR	DPR			Pembahasan Tk I			
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR			Pembahasan Tk I			
17	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR			DPR	DPR	DPR			Pembahasan Tk I			
18	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR			DPR	DPR	DPR			Pembahasan Tk I			

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PERNAH MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN					PROSES				KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK I	PEMBAHASAN TK II	
19	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
20	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAH/DPD	PEMERINTAH		PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
21	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PEMERINTAH		PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
22	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH			PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH			PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
24	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH	PEMERINTAH		PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
25	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD		DPD	DPD	DPD	DPD			Pembahasan Tk I		Rapat Panja RUU tentang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI dg

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PERNAH MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN					PROSES				KETERANGAN	
			2015	2016	2017	2018	2019	INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II		
													Pemerintah tgl 28 Januari 2019
26	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD	DPD	DPD	DPD	DPD	DPD				Pembahasan Tk I		
27	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD				DPD	DPD				Pembahasan Tk I		Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan RDPU dengan Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dengan acara mendapatkan masukan / tanggapan atas RUU tentang Daerah Kepulauan. Tanggal 13 Feb 2019
28	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR			Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
29	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR				DPR	DPR			Menunggu Surat Presiden (Surpres)			

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PERNAH MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN					PROSES				KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II	
30	RUU tentang Pekerja Sosial	DPR				DPR	DPR		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
31	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	DPR			DPR	DPR	DPR			Pembahasan DIM di Pemerintah		
32	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH			PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
33	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	PEMERINTAH	PEMERINTAH		PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
34	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	PEMERINTAH			PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			Menunggu jadwal Pemb tingkat I di Komisi III
35	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH			PEMERINTAH	PEMERINTAH	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
36	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH				PEMERINTAH	PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PERNAH MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN					PROSES				KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK I	PEMBAHASAN TK II	
37	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH				PEMERINTAH	PEMERINTAH			Pembahasan Tk I		
38	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR			Pembahasan Tk I Pembahasan DIM di Pemerintah		
39	RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	DPR	Proses Harmonisasi				
40	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR			DPR	DPR	DPR	Proses Harmonisasi				
41	RUU tentang Hukum Acara Pidana	DPR				DPR	DPR	Penyusunan				
42	RUU tentang Penyadapan	DPR				DPR	DPR	Penyusunan				
43	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR				DPR	DPR	Penyusunan				
44	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR					DPR	Penyusunan				



NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PERNAH MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN					PROSES				KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II	
45	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR					DPR	Penyusunan				
46	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR					DPR	Penyusunan				
47	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR					DPR	Penyusunan				
48	RUU tentang Permusikan	DPR					DPR	Penyusunan				
49	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR					DPR	Penyusunan				
50	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR					DPR	Penyusunan				
51	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH					PEMERINTAH	Penyusunan				
52	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH					PEMERINTAH		Menunggu Surat			

NO.	JUDUL RUU	PENGUSUL	PERNAH MASUK DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN					PROSES				KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	INTERNAL	SURPRES	PEMBAHASAN TK 1	PEMBAHASAN TK II	
									Presiden (Surpres)			
53	RUU tentang Data Pribadi	PEMERINTAH					PEMERINTAH	Penyusunan				
54	RUU tentang Wabah	PEMERINTAH					PEMERINTAH		Menunggu Surat Presiden (Surpres)			
55	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD					DPD	Penyusunan				

**DAFTAR KUMULATIF TERBUKA  
PROLEGNAS TAHUN 2019**

<u>No</u>	<u>Kriteria</u>	<u>Judul</u>
1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>UU No. 1 Tahun 2019</b> tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition)</li> <li>2. <b>UU No. 2 Tahun 2019</b> Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between The Ministry of Defence of The Republic of Indonesia and The Ministry of Defence of The Kingdom of Spain on Cooperative Activities in The Field of Defence)</li> <li>3. <b>UU No. 3 Tahun 2019</b> tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between</li> <li>4. <b>UU No. 5 Tahun 2019</b> tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja sama di Industri Pertahanan (Agreement Between the Government of The Republic of Belarus on Defence Industri Cooperation)</li> <li>5. <b>UU No. 6 Tahun 2019</b> tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal balik dalam masalah Pidana antara RI dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates)</li> </ol>
2.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota	
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	
5.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi	